

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 26 TAHUN 2012  
TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN**

Contoh 1

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN \*)

Alamat lengkap

No. Telepon

Nomor : .....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Angkutan Penyeberangan

Kepada  
Yth. Gubernur DKI Jakarta /  
Bupati / Walikota  
..... \*)  
di  
.....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri atas:
  - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau koperasi, yang didirikan khusus untuk usaha itu;
  - b. Bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
  - d. pernyataan tertulis sanggup memiliki kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal;
  - e. Rencana lintas yang akan dilayani;
  - f. tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis, dan/atau teknis pelayaran niaga;
  - g. tenaga ahli dalam pengelolaan usaha angkutan penyeberangan;
  - h. rencana usaha (*business plan*) di bidang angkutan penyeberangan.
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan penyeberangan.

DIREKTUR PERUSAHAAN / KOPERASI /  
PERORANGAN ..... \*)

Materai Rp. 6.000,-

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Gubernur yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu.

Khusus untuk DKI Jakarta permohonan ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta

.....  
(Nama Jelas)

Contoh 2

**GUBERNUR DKI JAKARTA/  
BUPATI / WALIKOTA ..... \*)**

Nomor : ..... , .....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan  
 Kepada : .....  
 Yth. : .....  
 di : .....

1. **Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor .... tanggal .... perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan Penyeberangan, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan:**
  - a. .... ;
  - b. .... ;
  - c. dst.
2. **Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 (satu), Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.**
3. **Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.**

Gubernur DKI Jakarta / Bupati / Walikota  
..... \*)

( ..... )

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Gubernur yang bersangkutan.

\*) Coret yang tidak perlu.



Contoh 4

NAMA PERUSAHAAN / KOPERASI / PERORANGAN ..... \*)

Alamat lengkap

No. Telepon

Nomor : ..... , .....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Yth. Kepada Direktur Jenderal / Gubernur / Bupati / Walikota ..... \*)  
 di  
 .....

1. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan, pada lintas penyeberangan .....
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
  - a. surat izin usaha angkutan penyeberangan;
  - b. lintas yang dilayani;
  - c. nama dan ukuran (GRT) kapal;
  - d. bukti kepemilikan kapal (*Grosse Akta*).
  - e. proposal bisnis, yang sekurang-kurangnya memuat :
    - 1) jumlah dan ukuran kapal (*ship particular*) yang akan dioperasikan;
    - 2) potensi jumlah permintaan angkutan (*demand*) dan target yang akan diraih sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ke depan;
    - 3) manajemen SDM;
    - 4) manajemen pengoperasian kapal;
    - 5) analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan.
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan penyeberangan.

DIREKTUR PERUSAHAAN / KOPERASI /  
 PERORANGAN ..... \*)

Materai Rp. 6.000,-

.....  
 (Nama Jelas)

Tembusan :

1. Menteri;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Gubernur / Bupati / Walikota ..... \*)).

\*) Coret yang tidak perlu.

Contoh 5

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ..... \*)

Nomor : ..... , .....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Penolakan Permohonan  
 Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan  
 Kepada Yth. ....  
 ....  
 di  
 .....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor .... tanggal .... perihal Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
  - a. .... ;
  - b. .... ;
  - c. dst.
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Demikian untuk dimaklumi dan diindahkan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
/ GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA  
..... \*)

( ..... )

Tembusan :

1. Menteri;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Gubernur / Bupati / Walikota ..... \*).

\*) Coret yang tidak perlu.

Contoh 6

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ..... \*)

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN

NOMOR :                      TAHUN

Berdasarkan surat permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan dari Perusahaan ... Nomor ... Tanggal ... diberikan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan kepada :

NAMA KAPAL	:	.....
PADA LINTAS	:	.....
NAMA PERUSAHAAN	:	.....
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN	:	.....
NAMA PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	:	.....
ALAMAT PEMILIK / PENANGGUNG JAWAB	:	.....
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)	:	.....
NOMOR SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (SIUAP)	:	.....

**KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN :**

1. Memiliki izin usaha yang sah.
2. Menyelenggarakan pelayaran penyeberangan menurut jadwal pelayaran, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan penyeberangan yang ditetapkan.
3. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diperoleh Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan, perusahaan harus melakukan kegiatan secara nyata.
4. Mengoperasikan kapal motor penyeberangan yang memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran dan spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan.
5. Mematuhi penggunaan dermaga ataupun tempat pendaratan lain yang ditetapkan oleh pihak-pihak lain yang berwenang.
6. Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turunnya penumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lainnya termasuk menyediakan ruangan untuk pos.
7. Menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
8. Melaporkan kegiatan operasional kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat / Gubernur / Bupati / Walikota ..... \*) yang bersangkutan sesuai bentuk dan waktu yang telah ditentukan.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMATUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL PENYEBERANGAN INI DAN / ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATANNYA.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL PENYEBERANGAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL ..... SAMPAI DENGAN TANGGAL .....

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : \_\_\_\_\_

NAMA JELAS  
PENANGGUNG JAWAB

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA  
..... \*)

( ..... )

( ..... )

KETERANGAN :	1. LEMBAR PERTAMA 2. LEMBAR KE DUA 3. LEMBAR KE TIGA 4. LEMBAR KE EMPAT 5. LEMBAR KE LIMA 6. LEMBAR KE ENAM	(ASLI) (DUPLIKAT 1) (DUPLIKAT 2) (DUPLIKAT 3) (DUPLIKAT 4) (DUPLIKAT 5)	BERADA PADA KAPAL YANG BERSANGKUTAN BERADA PADA DITJEN HUBDAT
--------------	--	--	--

Tembusan :  
Menteri \*\*)

KETERANGAN:

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Untuk persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antarprovinsi dan/atau antarnegara.



Contoh 8

LAPORAN KINERJA USAHA PERUSAHAAN

TAHUN PERUSAHAAN : .....

NO	LINTAS YANG DILA YANI	JUMILAH KAPAL	JUMLAH CABANG / PERUSAHAAN	JUMLAH & KUALIFIKASI SDM YANG DIPEKERJAKAN	KETERANGAN

..... 20 .....

PERUSAHAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN

( ..... )